

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Terdapat bermacam – macam definisi yang di kemukakan para ahli. Menurut Dr. Rachmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasar dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut : “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal ( kontraprestasi ), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ”, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan surat sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal – balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak ( 1992 ) diungkapkan bahwa “ Pajak adalah peralihan sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan ( tegenprestatie ) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat

atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”.

Definisi pajak dari berbagai ahli di atas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Adapun definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( disingkat “UU KUP” ) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besar kemakmuran rakyat. Definisi pajak secara resmi di dalam Undang – Undang belum pernah ada dan baru ada pada Pasal 1 Undang – Undang No 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983.

### **2.1.2. Ciri Pajak**

Berdasarkan pengertian pajak secara ekonomis ( pajak sebagai pengalihan dana dari sektor privat ke sektor publik ) atau pengertian secara yuridis ( pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan ) dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri pajak ( Wikipedia, 2010 ) antara lain :

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh Pemerintahan Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana ( sumber daya ) dari sektor swasta ke sektor Negara.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individu oleh Pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak ( WP ).
5. Selain fungsi *budgetair* yaitu fungsi untuk mengisi kas Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial ( *regulair* ).

### **2.1.3. Jenis Pajak**

Dalam berbagai literatur ilmu keuangan Negara dan pengantar ilmu hukum pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis – jenis pajak.

Perbedaan pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat – sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria diatas ( Diaz Priantara, 2012 ) :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya, WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak yang dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh :  
Pajak Penghasilan  
( PPh ).

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pajak ini dipungut oleh WP ( Pengusaha Kena Pajak) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.

## 2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya, contoh WP adalah PPh.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi Bangunan ( PBB ).

## 3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak, misalnya adalah PPh dan PPN.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air dibawah Tanah dan Air Permukaan Tanah. Sedangkan pajak Kabupaten / Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Golongan C.

#### 2.1.4. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri.

Pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu (Diaz Priantara, 2012 ) :

1. Fungsi *budgetair* ( pendanaan )

Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara.

2. Fungsi *regulair* ( mengatur )

Fungsi ini disebut fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah.
- b. Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa ke luar negara.
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan.

### **2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak**

Bukan perkara mudah untuk bisa membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka menurut Mardiasmo ( 2009:2 ), pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu :

#### **1. Pemungutan oajak harus adil**

Seperti halnya produk, hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contoh :

- 1.a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
- 1.b. Pajak di berlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
- 1.c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

#### **2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU**

Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi : “ Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu :

- 2.a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
- 2.b. Jaminan hukuman bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- 2.c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.
- 2.d. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
- 2.e. Pemungutan pajak harus efisien.
- 2.f. Sistem pungutan pajak harus sederhana. Apabila sistem pemungutan pajak rumit, orang akan enggan membayar pajak.

Contoh :

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi dua macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan ( pribadi ).

#### **2.1.6. Asas Pemungutan Pajak**

Ada tiga asas pemungutan pajak yang diutarakan oleh Diaz Priantara dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, adalah sebagai berikut :



### 1. Asas domisili atau tempat tinggal

Asa ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahny baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

### 2. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal WP apakah di wilayahnya atau di luar wilayahnya.

### 3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang WP. Contoh adalah pajak bangsa asing yang dahulu pernah berlaku di Indonesia, besarnya pajak ini berbeda sesuai dengan kewarganegaraan atau kebangsaan seorang WP.

#### **2.1.7. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Beberapa teori dibawah ini merupakan teori yang Mendukung Negara melakukan pemungutan pajak dari masyarakat ( Diaz Priantara, 2012 ) :

### 1. Teori asuransi

Menurut teori ini, salah satu tugas Negara adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya atas keselamatan jiwa dan hartanya dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan.

### 2. Teori kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa Negara dan rakyatnya saling memiliki kepentingan. Rakyat membutuhkan Negara sebagai pengayom, pelindung, dan pengatur. Tetapi agar Negara dapat menjalankan perannya maka diperlukan dana. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya – biaya yang dikeluarkan Pemerintah dibebankan kepada rakyat.

### 3. Teori gaya pikul

Pada teori ini pajak yang dibebankan kepada masing – masing orang berdasarkan pada gaya pikul seseorang atau kemampuan seseorang. Ukuran objektif gaya pikul adalah berdasarkan penghasilan. Makin besar penghasilan berarti makin mampu memikul beban pajak.

### 4. Teori kewajiban mutlak atau teori bakti

Berlawanan dengan teori - teori sebelumnya yang melihat ada hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya dan tidak

mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya maka teori ini mendasrkan pada paham bahwa karena sifat suatu negara maka dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk memungut pajak dan kewajiban rakyat untuk membayar pajak yang pada akhirnya menjadi suatu tanda bakti rakyat kepada Negara

#### 5. Teori asas gaya beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak diibaratkan dengan pompa yang mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat kepada rumah tangga Negara dan selanjutnya memompa keluar untuk menyalurkan kembali dari Negara kepada masyarakat.

## 2.2 **Pajak Penghasilan**

### 2.2.1. **Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

### 2.2.2. **Subjek Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia

lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka

waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

### **2.2.3. Bukan Subjek Pajak**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk obyek pajak sebagai berikut:

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **2.2.4. Objek Pajak**

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian,

maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

### **2.3. Pengolahan Data dan Informasi**

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai bagian pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, serta perekaman dokumen perpajakan. Selain itu, tugas dari seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah sebagai berikut :

- a. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- b. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
- c. Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan
- d. Pelayanan dokumen teknis komputer
- e. Pemantauan aplikasi e-spt dan e-filling
- f. Penyiapan laporan kinerja

### **2.4. Seksi Pelayanan**

Seksi pelayanan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan seksi pelayanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian

dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **2.5. Kebijakan Pelayanan**

Merupakan sebuah kebijakan yang dimiliki dan dijalankan oleh KPP Pratama Pamekasan sebagai upaya inovasi dan kebijakan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan

Salah satu kebijakan yang paling efektif adalah dengan sosialisasi. Terbukti apabila sosialisai diadakan, banyak Wajib Pajak yang tersaring dan akhirnya mau membayar kewajiban perpajakannya terhadap negara. Hal ini merupakan hal positif bagi petugas Wajib Pajak dan bagi Negara khususnya.

Namun, karena masih minimnya tingkat pengetahuan pajak pada masyarakat, khususnya masyarakat Pamekasan para petugas pajak memiliki tantangan sendiri untuk dapat mengoptimalkan pelayanannya dalam bentuk kebijakan – kebijakan yang telah dijalankan sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya.